



## **Etika Komunikasi Politik pada pemilihan Umum Terkait Hoax Tahun 2024**

**Rifqi Andhy Mahardhika<sup>1</sup>, Muhammad Rafli<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia  
Email : [rifqiandhy9@gmail.com](mailto:rifqiandhy9@gmail.com)

### **Abstract**

*The widespread spread of hoaxes and disinformation across various social media platforms has led to polarization, decreased public trust in political institutions, and clouded voter rationality. This study aims to analyze the practice of political communication ethics during the 2024 election campaign, focusing on how political actors, the media, and the public produce and respond to potentially misleading information. A qualitative approach was used with literature review and discourse analysis methods on political communication content in online media. The findings indicate that weak digital literacy, short-term electoral interests, and insufficient enforcement of regulations are key factors exacerbating unethical political communication practices. Therefore, strengthening political communication ethics through media literacy education, transparency of information from election organizing bodies, and moral commitment from political actors is essential to safeguard the integrity of democracy. The impact of unethical political communication is significant, including increased social polarization, decreased public trust in the democratic process, and the erosion of moral values in the public sphere. To address these issues, the strengthening of political communication ethics through media literacy education for the public, the enforcement of strict regulations on the spread of false information, and moral commitment from political actors and the media are necessary to uphold the integrity of democracy. Thus, political communication ethics should not only serve as a moral guideline but also as a crucial instrument in building a healthy, rational, and civilized election.*

**Keywords:** political communication ethics, hoaxes, disinformation, 2024 election, media literacy, polarization, democracy integrity, information regulation, transparency, media literacy education.

### **Abstrak**

*Fenomena penyebaran hoaks dan disinformasi yang masif di berbagai platform media sosial telah menyebabkan polarisasi, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik, serta mengaburkan rasionalitas pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik etika komunikasi politik selama masa kampanye Pemilu 2024, dengan fokus pada bagaimana aktor politik, media, dan masyarakat memproduksi serta merespons informasi yang berpotensi menyesatkan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi literatur dan analisis wacana terhadap konten komunikasi politik di media daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya literasi digital, kepentingan elektoral jangka pendek, dan minimnya penegakan regulasi menjadi faktor utama yang memperburuk praktik komunikasi politik yang tidak etis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika komunikasi politik melalui pendidikan literasi media, transparansi informasi dari lembaga penyelenggara pemilu, serta komitmen moral dari para pelaku politik untuk menjaga integritas*

demokrasi. Dampak dari komunikasi politik yang tidak beretika sangat signifikan, meliputi meningkatnya polarisasi sosial, menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan tergerusnya nilai-nilai moral dalam ruang publik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan etika komunikasi politik melalui pendidikan literasi media bagi masyarakat, penerapan regulasi yang tegas terhadap penyebaran informasi palsu, serta komitmen moral dari para aktor politik dan media massa untuk menjaga integritas demokrasi. Dengan demikian, etika komunikasi politik bukan hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga instrumen penting dalam membangun Pemilu yang sehat, rasional, dan berkeadaban.

**Kata kunci:** etika komunikasi politik, hoaks, disinformasi, Pemilu 2024, literasi media, polarisasi, integritas demokrasi, regulasi informasi, transparansi, pendidikan literasi media.

## PENDAHULUAN

Penyebaran hoaks melalui media digital semakin tidak terbendung dari tahun ke tahun termasuk hoaks dengan tema politik. Kemkomdigi di awal 2024 telah menangani 2.882 konten hoaks yang tersebar di media sosial dan 203 diantaranya adalah hoaks tentang Pemilu. Salah satu alat propaganda yang efektif untuk memanipulasi opini publik dan hasil pemilu adalah penyebaran hoaks. Studi ini bertujuan untuk mengungkap moralitas pesan politik terkait hoaks terkait pemilu di Indonesia pada tahun 2024. Baik dunia nyata maupun dunia maya memiliki peran dalam pemilu saat ini. Cara orang-orang di Indonesia berbicara tentang politik telah berubah drastis akibat maraknya media sosial dan berbagai bentuk teknologi informasi modern lainnya.

Di satu sisi, media digital membuka peluang bagi partai politik dan calon pemimpin untuk menjangkau pemilih secara lebih luas dan interaktif. Namun, di sisi lain, dunia digital juga menjadi tempat yang mudah untuk penyebaran hoaks, disinformasi, dan memanipulasi opini publik yang mengancam etika komunikasi politik dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Pesan hoaks yang masuk kedalam kategori menyesatkan dan manipulatif biasanya digunakan untuk menjatuhkan lawan politik yang kebanyakan disebarkan dalam bentuk video di Youtube dan Tiktok. Hoaks dengan Artificial intelligence atau AI juga mulai banyak di temukan.

Hoaks dimasa pemilu merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Hoaks politik dapat menjadi sebuah instrument propaganda yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik seperti yang di sampaikan oleh (Utami dalam Suliyansyah,2023) bahwa hoaks politik menjadi alat untuk melakukan propaganda agar masyarakat daopat berpihak pada salah satu kubu. Sedangkan menurut Higgin dalam (Juditha & Darmawan, 2024) hadirnya hoaks membuat masyarakat kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan informasi

yang salah yang disebut sebagai era *post truth*. Komunikator penyebar hoaks biasanya adalah pihak-pihak yang tidak menyukai paslon tertentu dan juga pemerintah. Konten hoaks dibuat untuk merugikan pihak tertentu dengan ujaran kebencian dan permusuhan yang di sebarakan secara berulang-ulang dengan motif politik yang sangat kental.

Etika komunikasi politik saat ini sangat penting untuk menjaga integritas dalam proses demokrasi. Tanpa etika komunikasi politik dapat berubah menjadi alat untuk memanipulasi masyarakat. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana pelanggaran etika komunikasi terjadi melalui penyebaran hoax, dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan public serta kualitas demokrasi di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1 Teori Komunikasi Politik**

Ketika orang berbicara tentang politik, pemerintahan, dan aktivitas politik dalam suatu sistem politik, mereka sedang terlibat dalam komunikasi politik. Komunikasi politik, subbidang studi komunikasi lainnya, berupaya menjelaskan dan menganalisis bagaimana wacana membentuk institusi politik, opini publik, dan pembuatan kebijakan. Studi komunikasi politik mencakup analisis transmisi, penerimaan, dan interpretasi komunikasi politik oleh berbagai pemangku kepentingan dalam proses politik.

Dalam konteks etika komunikasi, etika komunikasi adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur cara manusia berintraksi secara lisan, tulisan, maupun nonverbal, agar komunikasi berjalan sopan, baik dan tidak menyakiti. Menurut Richard L. Johannesen, banyak orang percaya bahwa ketika kita berkomunikasi, kita harus mematuhi seperangkat aturan yang disebut “etika komunikasi”. Aturan-aturan ini memberi tahu kita cara memperlakukan orang lain dengan bermartabat dan hormat, serta cara mengendalikan tindakan kita agar tidak menyakiti perasaan mereka (Fahrudin, 2021).

Sejumlah otoritas juga menawarkan definisi subjektif mereka sendiri tentang komunikasi politik. Rush dan Althoff (1997) Menawarkan deskripsi komunikasi politik sebagai tindakan mengidentifikasi dan menyampaikan informasi politik penting di dalam dan lintas sistem politik, serta antara sistem sosial dan sistem politik. Sederhananya, komunikasi

politik memainkan peran krusial dalam menyebarkan informasi politik, yang pada gilirannya berdampak pada kehidupan masyarakat dalam berbagai cara.

Komunikasi politik merupakan komponen esensial dari setiap sistem politik, komentator Gabrel Almon. Penetapan aturan, implementasi aturan, agregasi kepentingan, penyusunan aturan, serta sosialisasi dan rekrutmen politik adalah enam proses lain yang terjadi bersamaan dengan proses komunikasi politik ini. Setiap aspek sistem politik mengandung komunikasi politik, sehingga komunikasi politik bukanlah bagian yang berdiri sendiri. Sedangkan menurut Prof. Alfian (1991) Aliran darah dalam tubuh dianalogikan dengan wacana politik. Menurut (Aly, 2010), sistem politik ditopang bukan oleh darah itu sendiri, melainkan oleh substansi yang terkandung di dalamnya. Meriam Budiardjo (1982) juga melihat komunikasi politik sebagai peran partai politik, yaitu penyebaran ide dan tujuan masyarakat serta pengorganisasiannya dengan tujuan memperjuangkannya sebagai kebijakan, dalam (Bab & Komunikasi, 2001).

## **2 Teori Propaganda**

Teori propaganda menjelaskan bagaimana informasi fakta, argument, rumor, atau kebohongan disebarluaskan secara sengaja untuk memengaruhi opini dan perilaku publik. Teori ini melihat propaganda sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah, kelompok politik, atau organisasi untuk membentuk persepsi dan mencapai tujuan tertentu. Teori ini sering kali digunakan untuk menganalisis cara propaganda untuk memanfaatkan emosi, menyederhanakan isu dan menggunakan symbol untuk memobilisasi massa, serta bagaimana propaganda dapat beroperasi secara terbuka atau tertutup.

Menurut Laswell dalam (Zakiyuddin, 2014) masyarakat disesatkan oleh propaganda, yang menabur keraguan, ketidakpastian, dan ketergantungan pada entitas yang sulit dipahami, tampak menipu, dan pada akhirnya terbantahkan. Penyebaran informasi dengan tujuan mengindoktrinasi seseorang atau kelompok ke dalam ideologi tertentu dikenal sebagai propaganda. Sedangkan menurut Richard Laitinen dan Richard Rakos (1997) dalam (Febriana et al., 2017), propaganda modern merupakan pengontrolan perilaku masyarakat melalui manipulasi media dibantu oleh tiga faktor: masyarakat yang kurang terlibat dalam politik dan kurang informasi; gaya hidup yang terus-menerus meresahkan; dan kurangnya keterlibatan khalayak dalam politik lokal dan nasional.

## **2 Definisi Hoax**

Hoax adalah informasi palsu,bohong,yang sengaja dibuat untuk disebar ke pada target tertentu,untuk menggiring,menegelabui opini public.biasanya informasi atau berita ini di sebarakan melalui media sosial dalam bentuk teks atau video yang tidak memiliki sumber yang tidak jelas dan bersifat menyudutkan pihak tertentu dan menyebabkan permusuhan dan kebencian. Saat ini, semakin banyak orang yang terjerumus dalam hoaks dan berita palsu daring. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah menggantikan cara-cara penyebaran misinformasi yang lebih tradisional, seperti spanduk, poster, dan selebaran, di era digital saat ini. Hoaks yang disebar oleh media tradisional cenderung cepat terbantahkan dan dilupakan, sementara hoaks yang memanfaatkan platform modern cenderung hilang selamanya.

Menurut Allcott and Gentzkow (2017:213) dalam (Batoebara et al., 2020) suatu berita dianggap palsu jika mengandung informasi yang berpotensi menyesatkan pembacanya. Tujuan umum berita palsu adalah menyesatkan pembaca agar mempercayai klaimnya dan bertindak sesuai dengan itu. Menurut pendapat Werme (2016:14) memberikan definisi berita bohong (hoax) sebagai informasi palsu yang bertujuan untuk disebar kepada khalayak ramai dan untuk mencapai tujuan politik. Sedangkan menurut (Silverman 2015) hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran (Nurlatun et al., 2021).

## **METODE PENULISAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dengan pendekatan deskriptif literatur, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sosial berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan berita yang beredar. Metode ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menganalisis data sekunder untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pelanggaran etika komunikasi politik dalam konteks penyebaran hoax pada pemilu 2024.

Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam pada makna, pengalaman,dan subjek penelitian dalam konteks

alaminya, menggunakan non-numerik seperti kata-kata dan observasi. metode ini bertujuan agar dapat menjawab “mengapa dan “bagaimana” suatu fenomena terjadi.

Penelitian kualitatif Menurut Sugiyono dalam (Safarudin et al., 2023) penelitian kualitatif berbeda dari penelitian eksperimental dalam beberapa hal penting: penelitian ini dilakukan dalam situasi alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan menggunakan teknik triangulasi (kombinasi), analisis bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam (Charismana et al., 2022) didefinisikan sebagai metode penyelidikan yang menghasilkan informasi deskriptif yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan catatan tertulis atau lisan tentang perilaku manusia.

Analisis deskriptif literatur adalah metode untuk menggambarkan, meringkas, dan menganalisis data dari berbagai sumber Pustaka (seperti jurnal, buku, dan laporan) untuk menjawab pertanyaan penelitian tanpa melakukan generalisasi yang lebih luas. Metode ini focus pada penyajian data yang telah terkumpul secara terperinci untuk memahami fenomena yang diteliti.

Metode pendekatan ini berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan pengintegrasian berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh pemahaman mendalam terhadap konsep dan teori yang mendasari penelitian. Pendekatan deskriptif literatur membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola, teori, dan konsep yang dapat menjelaskan fenomena hoax politik dalam Pemilu 2024 di Indonesia.

Metode penelitian ini juga digunakan untuk membandingkan pandangan dari berbagai ahli mengenai etika komunikasi politik, serta mengaitkannya dengan kasus yang sering terjadi selama pemilu. Oleh karena itu, temuan penelitian ini akan memberikan pencerahan tentang pentingnya etika komunikasi dalam politik, khususnya mengingat kesulitan yang ditimbulkan oleh misinformasi di era digital modern.

Selain itu, metode analisis deskriptif literatur dipilih oleh penulis karena metode ini memberikan fleksibilitas dalam meninjau data sekunder yang beragam, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk melihat hubungan antara konsep etika komunikasi, dan dampak sosial politik dari penyebaran hoax.

Dengan melakukan cara ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi komunikasi politik di Indonesia selama pemilu 2024 tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Dengan demikian, metode analisis deskriptif literatur menjadi dasar penting dalam penyusunan kerangka pemikiran dan pembahasan penelitian agar hasil yang diperoleh lebih terarah dan ilmiah.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Pelanggaran Etika Komunikasi Politik dalam Penyebaran Hoax Selama Pemilu 2024**

Pemilihan Umum 2024 di Indonesia menjadi salah satu ajang demokrasi terbesar yang melibatkan partisipasi dari masyarakat Indonesia, namun dalam proses Pemilu muncul berbagai bentuk pelanggaran etika komunikasi politik yang ditandai dengan banyaknya penyebaran hoax. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa penyebaran informasi palsu, manipulasi data, dan fitnah terhadap salah satu paslon.

Salah satu pelanggaran yang paling terlihat adalah penyebaran berita palsu yang menyerang reputasi lawan politik. Banyak akun media sosial, baik akun anonym maupun yang terafiliasi dengan kelompok tertentu, menyebarkan informasi yang tidak benar untuk mempengaruhi persepsi dari masyarakat. Contohnya adalah penyebaran hasil survey fiktif yang sengaja direkayasa untuk menciptakan kesan popularitas semu.

Selain itu juga ditemukan pelanggaran etika dalam bentuk framing yang menyesatkan. Beberapa media online membuat potongan pernyataan dari salah satu kandidat untuk memnbentuk opini tertentu di lingkungan masyarakat. Praktik ini melanggar perinsip etika komunikasi yang seharusnya menuntut kejujuran, kelengkapan informasi, dan tanggung jawab sosial terhadap publik.

Lalu pelanggaran dalam bentuk kampanye hitsm (black campaign), dimana isu-isu pribadi atau tidak relevan dengan kapasitas kepemimpinan digunakan untuk menjatuhkan citra lawan politik. Fenomena pelanggaran ini menunjukkan bahwa Sebagian actor politik belum menerapkan nilai etika komunikasi yang menekankan penghormatan terhadap individu dan keadilan informasi.

## 2. Faktor yang Mendorong Aktor Politik Menggunakan Hoax Sebagai Strategi Kampanye

Penggunaan Hoax dalam komunikasi politik tidak muncul tanpa sebab. Berdasarkan hasil analisis dan literatur terhadap berbagai kasus pemilu 2024, penulis menemukan beberapa factor utama yang mendorong actor politik atau tim sukses menggunakan hoax sebagai stratego kampanye.

Pertama factor kompetisi politik yang ketat. Dalam system demokrasi di sosial media, persaingan antar kandidat sangat tinggi, dan setiap pihak berupaya mencari cara cepat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hoax sering dianggap sebagai cara yang efektif untk menggiring opini publik dengan biaya yang sedikit namun memiliki dampak yang besar.

Kedua, factor perkembangan teknologi digital dan media sosial. Platform digital seperti X, Facebook, Instagram, dan Tiktok memungkinkan penyebaran informasi secara merata dan sangat cepat, dan untuk memposting sebuah video sering kali tanpa melalui proses verifikasi. Algoritma media sosial juga memperkuat *echo chamber effect*, di mana pengguna hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, sehingga hoax politik mudah menyebar dan dipercaya.

Ketiga, kurangnya literasi digital. Banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan kritis dalam memilih informasi, sehingga lebih mudah percaya terhadap berita yang mendukung pandangan politiknya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh actor politik untuk membuat narasi yang menguntungkan pihaknya meskipun hal itu tidak berdasarkan fakta.

## 3. Dampak Penyebaran Hoax terhadap Pandangan Publik dan Kualitas Demokrasi

Penyebaran hoax selama Pemilu 2024 memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Hoax menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Akibatnya, opini publik terbentuk berdasarkan persepsi yang keliru, bukan pada fakta yang objektif.

Penyebaran hoax juga akan berdampak pada menurunnya kulaitas demokrasi. Demokrasi yang sehat menunjukkan adanya komunikasi politik yang jujur, transparan dan berlandaskan nilai moral. Ketika informasi palsu lebih mendominasi di lingkungan masyarakat, proses pengambilan keputusan politik oleh masyarakat menjadi tidak rasional. Hal ini dapat mengarah pada terpilihnya pemimpin berdasarkan persepsi yang salah, bukan karena tujuan dan integritas yang sebenarnya.

Fenomena ini juga mendorong munculnya berbagai gerakan positif dari masyarakat sipil dan pemerintah untuk menanggulangi hoax dalam kegiatan politik. Program literasi digital yang dibuat oleh kominfo menjadi sebuah Langkah penting dalam meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya etika komunikasi dan tanggung jawab bersama dalam menyebarkan sebuah informasi.

#### **4. Keterkaitan Etika Komunikasi Politik dalam Mencegah Hoax**

Etika komunikasi politik menjadi landasan moral dalam menjalankan demokrasi yang sehat. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap kebenaran harus menjadi pedoman bagi para pelaku politik dalam menyampaikan pesan publik.

Dengan menerapkan etika komunikasi politik, setiap kandidat dan tim kampanye diharapkan dapat menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan data yang dapat diverifikasi. Hal ini tidak hanya menjaga integritas pribadi dan lembaga politik, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyebaran informasi hoax yang dapat merusak kepercayaan dari masyarakat.

Selain itu, etika komunikasi politik juga berfungsi sebagai panduan bagi media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Media harus bisa menolak menjadi alat propaganda dan memastikan setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi. Di era digital saat ini, peran etika menjadi semakin penting karena batas antara jurnalis profesional dan konten media sosial semakin mudah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoax dalam Pemilihan Umum 2024 dapat dilihat berbagai pelanggaran etika komunikasi politik. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi penyebaran informasi palsu, manipulasi data, dan kampanye hitam. Semua Tindakan pelanggaran tersebut bertentangan dengan prinsip etika komunikasi yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi terhadap kebenaran.

Faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena hoax antara lain persaingan politik yang ketat, kemajuan teknologi digital, dan kurangnya literasi digital. Membuat para aktor politik cenderung menggunakan hoax sebagai strategi untuk menggiring opini publik dengan cara cepat, meskipun hal tersebut melanggar norma moral dan etika demokrasi.

Dampak dari penyebaran hoax juga sangat luas, seperti menurunnya kepercayaan terhadap media dan lembaga negara, serta menurunnya kualitas demokrasi. Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat untuk dialog rasional berubah menjadi tempat konflik opini yang emosional dan manipulatif.

Dengan demikian penerapan etika komunikasi politik menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan demokrasi. Etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi aktor politik, tetapi juga sebagai cara pengendali agar komunikasi publik tetap jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

## SARAN

Untuk mencegah terulangnya pelanggaran etika komunikasi politik di masa mendatang, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan:

1. Bagi masyarakat, peningkatan literasi digital dan politik harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu, dan mengikuti proses demokrasi secara sehat.
2. Bagi media massa dan jurnalis, penting untuk menjaga profesionalisme dengan memverifikasi setiap informasi sebelum disebarkan ke masyarakat.
3. Bagi akademisi dan lembaga Pendidikan, diharapkan dapat memperluas penelitian serta edukasi mengenai etika komunikasi politik dan dampak hoax terhadap demokrasi, sehingga kesadaran masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- (Indriasari, R. (2024). Buku Komunikasi Politik Pemerintahan.)
- Aly, B. (2010). *Komunikasi Pembangunan dengan Aksentuasi Komunikasi Politik*. 08(2).
- Bab, I., & Komunikasi, A. D. (2001). *No Title*. 1–25.
- Batoebara, M. U., Suyani, E., & Nuraflah, C. A. (2020). *LITERASI MEDIA DALAM MENAGGULANGI BERITA HOAKS ( Studi Pada Siswa SMKN 5 Medan )*. 14, 34–41.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>

- Fahrudin, A. (2021). *Etika Komunikasi Pejabat Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. 2(02), 121–144.
- Febriana, O. P., Kulia, M., & Massa, K. (2017). *Kemunculan Teori Media di Era Propaganda Materi Semester Pendek*. 3–5.
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2024). *KOMUNIKASI POLITIK TERKAIT HOAKS PADA PEMILU PRESIDEN INDONESIA 2024 POLITICAL COMMUNICATION RELATED TO HOAXES IN THE 2024*. 167–182. <https://doi.org/10.17933/jskm.2024.5682>
- Nurlatun, R., Nayoan, H., & Pangemanan, F. (2021). *Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu ( Hoax ) di Media Sosial ( Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado )*. 1(2), 1–8.
- Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Kualitatif*. 3, 9680–9694.
- Zakiyuddin, A. (2014). *No Title*. 1, 39–58.